

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH
(Studi Pada Kabupaten Keerom)

Gracelia Christi Sopamena ^{*1}
Dr. Maylen K Petra Kambuaya, SE., M.Si., Ak., CA ²
Rama Soyan Arunglamba, SE., M.SA., Ak³

^{*1,2,3}Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Cenderawasih
^{*}Corresponding Author

Abstract

Research is intended to measure the effect of reporting the financial area and accessibilities financial report against the user information about the financial area ie Parliament, employees of the inspectorate, and society. This analysis uses two variables: the dependent variable or the user of regional and independent financial information or presentation of regional financial statements. The sample of this research is the Keerom Regency DPRD as the main user of financial reports, Keerom Regency Inspectorate employees, Keerom Regency BAPPEDA employees, and the Provincial BPK. Samples were done by using the snowball method. This research is a quantitative study with a sample size of 83. Data was obtained through a questionnaire distributed directly to the DPRD, inspectorate employees, BAPPEDA, and BPK employees. The analytical method used in this research is the Partial Least Square (PLS) method.

The results of this study indicate that: 1. The presentation of regional financial statements has a significant effect on the use of regional financial information. 2. Regional Financial Accessibility does not have a significant effect on the Use of Regional Financial Information. 3. Simultaneous Presentation of Regional Financial Statements and Regional Financial Accessibility Affect the Use of Regional Financial Information.

Keywords: *Report of the financial area; accessibilities report financial; and users of information financial.*

1. Pendahuluan

Reformasi diberbagai bidang khususnya dalam bidang sektor publik di Indonesia telah membawa perubahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam dalam kebijakan pemerintah daerah yang baik. Otonomi daerah dan sitem pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu agenda reformasi. Ditandai dengan diterbitkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 yang diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dilaksanakannya undang-undang otonomi tersebut maka dapat memberikan wewenang kepada penyelenggara pemerintah daerah yang lebih luas, *rill*, dan bertanggung jawab. Adanya keseimbangan tugas dan fungsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyebabkan

Otonomi daerah dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5, merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternative sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai prioritas dan aspirasi masyarakat. (Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, 2004).

Laporan keuangan pemerintah harus disampaikan atau dipublikasikan kepada masyarakat sebagai salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah. Publikasi laporan keuangan pemerintah telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 9 tentang keterbukaan informasi publik, dinyatakan bahwa publikasi laporan keuangan pemerintah kepada masyarakat merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah yang harus dilakukan secara rutin, teratur dan dalam jangka waktu tertentu.

Laporan keuangan Kabupaten Keerom saat ini sangat penting untuk diakses oleh setiap stakeholder, baik itu DPRD kabupaten keerom, badan pengawas daerah atau Inspektorat daerah, BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan juga BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang membutuhkan, sehingga mereka dapat membantu pemerintah dalam hal pembangunan daerah. Kurangnya akuntabilitas dari pemerintah daerah yang menyediakan informasi keuangan yang dapat mempermudah akses untuk melihat lebih banyak laporan keuangan tahunan yang mengandung semua informasi yang relevan, tetapi ada laporan keuangan yang kurang relevan. Namun permasalahan yang dihadapi sekarang adalah publikasi laporan keuangan oleh pemerintah nampaknya belum menjadi hal yang umum. Peran laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial.

Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas pengelolaan keuangan. “Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2019, laporan keuangan Kabupaten Keerom mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah masih terdapat kekurangan, dan dalam pemeriksaan BPK terdapat temuan-temuan adanya permasalahan utama yang berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan yaitu antaran lain penyelesaian kas dibendahara pengeluaran belum tertib, belanja belum dipertanggungjawabkan dan pengelolaan asset dan persediaan belum tertib maka dapat mengurangi kualitas akuntabilitas untuk laporan keuangan Kabupaten Keerom (papasatu.com, 2019). Selain itu juga hasil pemeriksaan BPK provinsi papua terhadap laporan keuangan kabupaten keerom salah satunya yaitu asset pemda Kab. Keerom yang tidak terdata serta masing-masing SKPD tidak mengelola assetnya dengan baik sesuai dengan aturan yang ada sehingga BPK memberikan opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat terhadap laporan keuangan pemda Kab. Keerom. (BPK, 2013).

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “ **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah** “ di Kabupaten Keerom. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rohman (2009). Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian yang akan dilakukan di Kabupaten Keerom, waktu penelitian dan ada penambahan dalam teori yang digunakan yang masih berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Rumusan Masalah

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap manfaat informasi keuangan daerah?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap manfaat informasi keuangan daerah?
3. Apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara simultan terhadap manfaat informasi keuangan daerah?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh penyajian keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh aksesibilita laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

2. Kajian Pustaka

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan sudah dipraktekkan pada tahun 1999 sejak diberlakukannya otonomi dipemerintah daerah. *Agency theory* dapat digambarkan bahwa hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (principal) yang menggunakan pemerintah (agent) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat. Penerapan teori keagenan ini dapat dijelaskan dari dua persepektif yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan legislatif dengan rakyat. Pengaruh dari hubungan antara keagenan dan principal dapat berupa hal positif dan negatif. Adapun dampak positifnya yaitu dalam bentuk efisiensi, sedangkan dampak negatifnya berupa perilaku *opportunistic*. Bandariy (2011).

Ini terjadi karena agen mendapatkan manfaat dari informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah daerah, sedangkan pemerintah daerah dapat menggunakan kepentingan pribadinya karena principal memiliki hak penuh. Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan kepentingan pribadinya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini baik, selain itu juga keagenan menyelamatkan posisinya dari mata rakyat dan juga legislatif. Tanggungjawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga pada bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko ketidakpercayaan pengguna laporan keuangan terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

Teori keagenan (*Agency Theory*) pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Dalam penelitian yang dilakukan tentang teori keagenan, yang dimana teori ini menjelaskan hubungan antara principal dan agent. Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu orang atau lebih, memberi kerja atau principal memberi pekerjaan untuk orang lain (agen) agar bisa melakukan sejumlah layanan atau jasa untuk mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen itu. Jensen & Meckling, (1976).

Jensen dan Meckling (1976), berpendapat bahwa *masalah keagenan* akan muncul jika proporsi kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari 100%. Karena itu, para pemimpin cenderung bertindak untuk membela mereka sendiri dan tidak berdasar pada pemaksimalan nilai perusahaan dalam mengambil keputusan pendanaan.

Teori keagenan akan terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan dan berfokus pada persoalan ketimpangan/asimetri informasi antara pengelola (agen/pemerintah) dan publik (diwakili prinsipal/dewan). Akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2006b). Berkaitan dengan

masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Laporan keuangan sektor publik, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*). Pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. Kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen.

Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan amanah dari rakyat mempunyai keinginan untuk menunjukkan sinyal kepada masyarakat. Pemerintah akan memberikan sinyal kepada masyarakat dengan cara memberikan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem pengendalian internal dan pengungkapan yang lebih lengkap dan transparan. Menurut Tjandrakirana dan Meva (2014) dalam penelitian yang dilakukan, ia menyatakan bahwa teori sinyal menjelaskan mengenai alasan perusahaan yang memberi informasi laporan keuangan kepada pihak luar dan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal kepada pihak pengguna laporan keuangan. Informasi ini dapat berupa laporan atau informasi tentang perusahaan.

Ratmono (2015:2) menyatakan bahwa teori sinyal dapat membantu pemerintah (agen) dan masyarakat (prinsipal) dalam mengurangi asimetri informasi. Pemerintah dapat mengurangi asimetri informasi dengan cara memberikan sinyal kepada masyarakat melalui pengungkapan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem pengendalian intern dan pengungkapan yang lebih lengkap.

Kaitan dari teori sinyal dengan penelitian ini adalah dalam teori sinyal dijelaskan mengenai pentingnya pemberian informasi yang harus diberikan kepada pihak dalam dan pihak luar. Pihak dalam disini dimaksudkan untuk pemerintah itu sendiri sedangkan pihak luar adalah anggota DPRD, Bawasda atau inspektorat daerah dan BPK. Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat menjadi signal bagi pihak luar, terutama bagi pihak yang berkepentingan adalah laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa dalam bentuk informasi akuntansi dalam bentuk informasi laporan keuangan dan informasi non akuntansi dalam bentuk informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak luar. Semua pengguna informasi keuangan tentunya memerlukan informasi untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah tersebut. Sehingga pihak pengguna informasi keuangan dapat mengukur transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan Kabupaten Keerom.

Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (PIKD)

Pembuatan laporan keuangan daerah bertujuan untuk memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Deniski (1973) yang dikutip dalam Sujana, (2002), *Impossibility Theory* berpendapat bahwa banyak jenis pengguna informasi untuk laporan keuangan dan pengguna mempunyai bermacam kepentingan, maka dari itu sulit untuk menyiapkan informasi yang relevan untuk dapat memuaskan semua jenis pengguna informasi dalam laporan keuangan.

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

SAP, (2005) dalam Hanif et al., (2015) menyatakan bahwa transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Menurut (Mardiasmo, 2006a) transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktifitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusan pemerintah daerah. Transparansi memungkinkan semua stakeholder dalam melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya serta laporan pertanggungjawaban. Hanif et al., (2015).

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan untuk memperoleh informasi yang relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya informasi berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan informasi penyajian laporan keuangan pemerintah. Akuntabilitas keuangan menurut LAN dan BPKP, (2003) dalam Mardiasmo, (2002) merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pertanggungjawaban laporan keuangan adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh pemerintah daerah.

Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan PP No.24 (2005).

Menurut *Governmental Accounting Standard Board (GASB, 1998)* tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik adalah :

1. Untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik.
2. Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting.

Berdasarkan pada *Impossibility Theory* Deniski, (1973) dalam Sujana, (2002), bahwa sangat sulit untuk menyiapkan informasi yang dapat memuaskan semua kelompok pengguna yang mempunyai berbagai macam kepentingan. Oleh karena itu Wilson and Kattelus (2002) dalam Rohman (2009) menyatakan bahwa system akuntansi pemerintahan harus, menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap dana dan aktivitas dari unit pemerintahan sesuai dengan GAAP; dan menentukan kesesuaian dengan peraturan keuangan yang terkait dan syarat-syarat kontraktual agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna.

Aksesibilitas Laporan Keuangan

Mulyana, (2006) dalam Fauziya and Handayani, (2017) menyatakan bahwa Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Penyajian adalah aspek yang penting dari aksesibilitas. Dengan kata lain laporan

keuangan harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya Henley *et al.*, (1990) dalam Rohman, (2009).

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

H1: Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah.

H2: Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah.

H3: Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan secara Simultan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah.

3. Metode Penelitian

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Penelitian dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Keerom, kantor Badan Pengawas Daerah (Bawasda) dan kantor BPK Provinsi. Lokasi ini dipilih karena sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 6 Juli 2020 sampai 20 Juli 2020.

Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna eksternal laporan keuangan Kabupaten Keerom, yaitu anggota DPRD, pegawai Inspektorat, pegawai BAPPEDA dan pegawai BPK.

b. Sampel

Sampel pada penelitian ini menggunakan metode *Sampling Snowball* yaitu teknik pengambilan data yang dilakukan secara bergulir dari responden satu ke responden yang lain dengan cara peneliti memilih satu ataupun dua responden yang dianggap dapat melengkapi data, kemudian responden tersebut menyebarkan kuesioner kepada pihak lain sehingga sehingga jumlah sampel semakin bertambah. Tujuan penelitian ini agar mendapat sampel yang akurat.

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data Primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama. Sumber data dari penelitian ini adalah berasal dari hasil penyebaran kuesioner kepada para responden yaitu, anggota DPRD, pegawai inspektorat dan pegawai BPK yang terpilih sebagai responden dalam penelitian ini. Penelitian ini akan dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Kuesioner ini dirancang untuk penelitian kuantitatif.

Metode pengumpulan data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan metode survey. Metode survey merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan mendistribusikan kuesioner atau wawancara secara langsung dengan pengguna laporan keuangan pemerintah daerah dilingkungan Kabupaten Keerom. Metode ini akan sangat membantu penulis dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Bentuk pertanyaan dalam kuesioner bersifat tertutup dan pertanyaan yang diajukan berhubungan dengan obyek penelitian agar memudahkan dalam pengukuran responden atau narasumber. Namun melihat dan juga turut merasakan kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengalami pandemi yang mengharuskan untuk diberlakukan batasan sosial sehingga tidak memungkinkan penulis untuk melakukan penyebaran kuesioner secara manual, maka dari itu penulis memilih untuk melakukan penyebaran kuesioner secara online dengan bantuan media elektronik agar dapat memudahkan penulis dalam mencari, mendata, mengumpulkan serta mengelola data untuk mendapatkan data yang relevan dan ril.

4. Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas

Uji Validitas dari model pengukuran dapat dilihat dari kolerasi antara skor konstruksya (*Loading Factor*) dengan kriteria nilai *loading factor* dari setiap indicator lebih besar dari 0,7 dapat dikatakan valid. Selanjutnya untuk nilai p-value < 0,5 dianggap signifikan. Namun menurut Chin, 1998 dalam (Ghozali, 2008) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading* 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Sedangkan menurut Hulland, 1999 dalam (Ghozali & Latan, 2015), untuk tahap pengembangan kontruk dan skala pengukuran atau pengembangan instrument penelitian, nilai *factor loading* 0,4 – 0,5 dianggap cukup. Oleh karena itu, *loading factor* antara 0,4 – 0,7 harus tetap dipertimbangkan untuk dipertahankan. Dijelaskan pula bahwa indikator dengan *loading* < 0,4 harus dihapus dari model. Penghapusan indicator dilakukan apabila indicator tersebut dapat meningkatkan AVE. nilai batas AVE 0,5 dan nilai *factor loading* harus lebih dari 0,7. Berikut hasil *output combined loading and cross-loading* :

Tabel 1 Output Latent Variabel Coefficients sebelum Penghapusan Indikator

	PLKD	ALK	PIKD
R-squared			0.442
Adj. R-squared			0.428
Composite reliab.	0.937	0.903	0.864
Cronbach's alpha	0.927	0.865	0.822
Avg. var. extrac.	0.518	0.597	0.397
Full collin. VIF	2.260	1.144	2.057
Q-squared			0.525

Sumber: Peneliti (2020)

Berikut ini hasil Tabel Output Latent Variabel Coefficients setelah indikator ALK7 dan PIKD1 dikeluarkan :

Tabel 2 Hasil Output Latent Variabel Coefficients Sesudah Penghapusan Indikator

	PLKD	ALK	PIKD
R-squared			0.454
Adj. R-squared			0.440
Composite reliab.	0.937	0.931	0.872
Cronbach's alpha	0.927	0.911	0.835
Avg. var. extrac.	0.518	0.693	0.434
Full collin. VIF	2.298	1.135	2.105
Q-squared			0.533

Sumber: Peneliti (2020)

Berdasarkan nilai AVE setiap konstruk memiliki nilai > 0,5, maka menunjukkan bahwa konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi validitas konvergen.

Uji Realibilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *Cronbach's alpha* dan *Composite Reliability* harus memiliki nilai diatas 0.7 sehingga konstruk dapat disimpulkan memenuhi uji reliabilitas. Nilai *Cronbach's alpha* dan *composite reliability* dapat dilihat pada tabel 4.12 dibawah ini:

Tabel 3 Output Latent Coefficients (uji reliabilitas)

	PLKD	ALK	PIKD
R-squared			0.454
Adj. R-squared			0.440
Composite reliab.	0.937	0.931	0.872
Cronbach's alpha	0.927	0.911	0.835
Avg. var. extrac.	0.518	0.693	0.434
Full collin. VIF	2.298	1.135	2.105
Q-squared			0.533

Sumber: Peneliti (2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap konstruk memiliki nilai *Cronbach's alpha* dan *Composite reliability* memiliki nilai diatas 0.7 sehingga bisa dinyatakan reliable atau keandalan data.

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi struktural (*inner Model*), tahap ini dilakukan dengan melihat nilai *adj.R-squared* untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model structural kemudian tahap selanjutnya yaitu *test* untuk menguji Q^2 Predictive relevance dan Goodness of Fit (GOF).

Selanjutnya dilakukan uji inner model dengan melihat nilai *adj.R-squared*, dimana nilai *adj.R-squared* pada variabel penggunaan informasi keuangan daerah menunjukkan nilai 0,440 yang berarti bahwa variabel penggunaan informasi keuangan daerah mampu dijelaskan oleh variabel penyajian laporan keuangan daerah dan variabel aksesibilitas laporan keuangan sebesar 4.40% dan sisanya 95.6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini atau factor yang tidak ada pada model.

Selain dengan melihat nilai *R-Squared*, suatu model dikatakan memiliki nilai predictive relevance jika nilai *Q-Squared* > 0 , nilai Q^2 Predictive Relevance penggunaan informasi keuangan daerah menunjukkan nilai $0,533 > 0$ yang berarti bahwa model memiliki nilai predictive relevance. Untuk menentukan suatu model dikatakan *fit* dalam WrapPLS 6.0 dapat ditunjukkan pada hasil *outgeneral results*. Pada tabel menunjukkan sepuluh indikator *fit* pada *output model fit indices* dan *p-values*, sebagai berikut:

Tabel 4 Model Fit and Quality Indices

<i>Model Fit and Quality Indices</i>	Indeks	P-Value	Kriteria	Keterangan
<i>Average Path coefficient (APC)</i>	0.396	< 0.001	$P > 0.05$	Diterima
<i>Average R-Squared (ARS)</i>	0.454	< 0.001	$P > 0.05$	Diterima
<i>Average adjusted R-Squared (AARS)</i>	0.440	< 0.001	$P > 0.05$	Diterima
<i>Average Blacok VIF (AVIF)</i>	1.163	<i>acceptable if ≤ 5, ideally ≤ 3.3</i>		Diterima
<i>Average Full Collinearity VIF (AFVIF)</i>	1.846	<i>acceptable if ≤ 5, ideally ≤ 3.3</i>		Diterima
<i>Tenenhaus GoF (GoF)</i>	0.499	<i>Small ≥ 0.1</i>		Diterima (large)
		<i>Medium ≥ 0.25</i>		
		<i>Large ≥ 0.36</i>		
<i>Sympson's paradox ratio (SPR)</i>	0.500	<i>acceptable if $\Rightarrow 0.7$, ideally = 1</i>		Diterima
<i>R-Squared Contribution ratio (RSCR)</i>	0.925	<i>acceptable if $\Rightarrow 0.9$, ideally = 1</i>		Diterima
<i>Statistical Suppression Ratio (SSR)</i>	1.000	<i>acceptable if ≥ 0.7</i>		Diterima
<i>Nonlinear bivariate Causality Direction Ratio (NLBCDR)</i>	1.000	<i>acceptable if ≥ 0.7</i>		Diterima

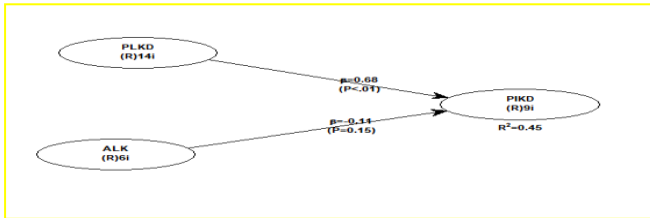
Sumber: Peneliti (2020)

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa model telah memenuhi kesepuluh kriteria model fit and quality indices, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut telah memenuhi syarat model fit.

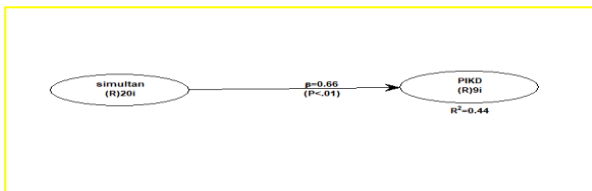
Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Penelitian atau hipotesis. Hasil kolerasi antar konstruk diukur dengan melihat *path coefficients* dan tingkat signifikansinya yang kemudian dengan hipotesis penelitian dibab dua. Tingkat signifikan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05%. Berikut ini hipotesis yang dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran dugaan penelitian yang terdiri dari dua hipotesis, yaitu :

Gambar 1 Hasil Output Model WarPLS 6.0



Gambar 2 Pengujian Secara Simultan WarPLS 6.0



Sumber: Peneliti (2020)

Tabel 5 Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Dependen	Independen	<i>p-values</i>	Keputusan
H1	Penyajian Laporan Keuangan Daerah	Penggunaan Informasi Keuangan Daerah	< 0,001	Diterima
H2	Aksesibilitas Laporan Keuangan	Penggunaan Informasi Keuangan Daerah	0,152	Ditolak
H3	Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan	Penggunaan Informasi Keuangan Daerah	< 0,001	Diterima

Sumber: Peneliti (2020)

Berdasarkan tabel hasil uji diatas, dapat diperoleh :

1. Uji hipotesis 1 diterima, artinya variabel penyajian laporan keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap variabel penggunaan informasi keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai beta (β) sebesar 0,68.
2. Uji hipotesis 2 ditolak, artinya variabel aksesibilitas laporan keuangan tidak memiliki pengaruh positif terhadap variabel penggunaan informasi keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai beta (β) sebesar 0,11.
3. Uji hipotesis 3 diterima, artinya variabel penyajian laporan keuangan daerah dan variabel aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel penggunaan informasi keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai beta (β) sebesar 0,66.

5. Kesimpulan

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, hipotesis dan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. hal ini berarti bahwa penyajian laporan keuangan daerah disajikan dengan baik dan lengkap mengikuti standar SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).
2. Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa pemerintah tidak memberikan akses yang baik kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. hal ini berarti bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama mempengaruhi informasi keuangan daerah.

Keterbatasan penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan saat ini bertepatan dengan adanya virus yang menjadi pandemik, sehingga penelitian ini tidak dapat bertatap muka dan melakukan wawancara secara langsung dengan responden sehingga informasi yang didapat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.
2. Jumlah responden yang tidak mencapai target dan tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
3. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya.
4. Penelitian ini merupakan metode survei dengan menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan sehingga hasil penelitian tidak dapat dikonfirmasi dan dijelaskan lebih detail.
5. Variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan 4.54% dan sisanya 95.46% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Saran

1. Penelitian ini hanya meninjau penggunaan informasi keuangan daerah dari aspek laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan saja, untuk penelitian selanjutnya dapat pula ditambahkan atau diganti variabel lainnya yang mampu membuktikan praktik.penggunaan informasi keuangan daerah dan perwujudan akuntabilitasnya oleh pemerintah daerah.
2. Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Keerom agar lebih transparan dalam mempublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada para pengguna laporan keuangan terlebih khususnya kepada masyarakat.
3. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya lebih memperluas lagi sampel penelitian yaitu dengan mengambil sampel dari SKPD sebagai penyaji laporan keuangan agar data yang diperoleh dapat dibandingkan antara pengguna internal dengan pengguna eksternal laporan keuangan.
4. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat meninjau kembali setiap butir-butir pertanyaan yang terdapat pada kuesioner.

Daftar Pustaka

- Diani, D. I. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Fauziya, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Diani, D. I. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Fauziya, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Ghozali & Latan. (2015). Partial Least Square SEM (PLS - SEM). *Partial Least Square*. <https://doi.org/10.1590/s1809-98232013000400007>
- Ghozali, I. (2008). SEM Metode Alternatif dengan PLS. In *Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Hanif, R. A., Ratnawati, V., & Saragih, C. A. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.
- Harahap, S. S. (2011). Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011. In *Rajawali Pers*. <https://doi.org/www.rajagrafindo.com>
- Heryana, A. (2015). Kerangka Teori, Kerangka
- Kawerda, W. (2008). Akuntansi Sektor Publik pendekatan Penggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah. In S. Rohman. *semarang: Universitas Diponegoro*.
- Mulyana. (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. In Budi. *jurnal akuntansi pemerintahan*.
- Pemendagri. (No. 13 Tahun 2006). *pedoman pengelolaan keuangan daerah*.
- Rohman. (2009). aksesibilitas, penyajian dan penggunaan Informasi keuangan Daerah. Tegal: *jurnal akuntansi*.
- Sujana. (2002). penggunaan informasi keuangan daerah. *springer references*.
- Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. In Budi. *jurnal akuntansi pemerintahan*.
- Pemendagri. (No. 13 Tahun 2006). *pedoman pengelolaan keuangan daerah*.
- Rohman. (2009). aksesibilitas, penyajian dan penggunaan Informasi keuangan Daerah. Tegal: *jurnal akuntansi*.
- Sujana. (2002). penggunaan informasi keuangan daerah. *springer references*.